

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peningkatan devisa, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan dengan melestarikan kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama. Kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, pelaku usaha, serta pemerintah terutama pada bidang ekonomi, diantaranya yaitu meningkatnya pendapatan daerah serta masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta dapat meningkatkan produktivitas serta partisipasi masyarakat untuk menjaga kekayaan alam daerah tersebut.

Pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya; namun jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan banyak permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak tempat wisata terletak pada koordinat $6^{\circ}5'46''$ sampai $7^{\circ}11'47''$ lintang selatan dan antara $109^{\circ}40'19''$ sampai $110^{\circ}3'6''$ bujur timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dengan luas daerah 78.864,15 Ha. Batas wilayah Kabupaten Batang adalah sebelah barat berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. (Rosardi, 2019, pp. 14–15).

Kabupaten Batang memiliki destinasi wisata yang terkenal dan sangat potensial untuk dikembangkan salah satunya adalah Pantai Ujungnegoro. Pantai Ujungnegoro terletak di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang merupakan salah satu pantai yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Pantai ini berjarak 5 km ke arah utara dari jalur pantura Semarang-Jakarta dan terletak 14 km arah timur laut dari Kota Batang, Jawa Tengah. Pantai Ujungnegoro memiliki pantai dengan pasir hitam dan dikelilingi oleh pantai berbatu di sepanjang pantainya. Pantai Ujungnegoro juga memiliki daya tarik yang tinggi di perbukitan di sekitarnya. Selain itu banyak potensi yang bisa dikembangkan di Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang ini, diantaranya adalah potensi wisata, potensi konservasi kelautan dan perikanan, potensi religi dan kearifan lokal, dan potensi ilmiah yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Batang.

Pantai ujungnegoro merupakan salah satu pantai di Kabupaten Batang yang memiliki pendapatan dan jumlah pengunjung yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pengunjung Pantai Ujungnegoro Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Pengunjung
2015	61.147
2016	91.739
2017	80.669
2018	76.271
2019	79.994
2020	60.562

Sumber : (Kabupaten Batang Dalam Angka 2021)

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Pengunjung Objek Wisata Pantai Ujungnegoro Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pendapatan
2017	383.177.750
2018	362.287.250
2019	387.125.000
2020	288.154.50

Sumber : (Kabupaten Batang Dalam Angka 2021, n.d.)

Pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro ini berpedoman pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2031 dan menerapkan program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 serta memiliki 7 unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur keamanan, dimaksudkan agar para wisatawan dapat merasakan suasana aman dimanapun ia berada selama mengadakan kunjungan, baik rasa aman yang ditimbulkan oleh karena tidak adanya gangguan kejahatan, sikap masyarakat, sarana maupun prasarana serta fasilitas yang terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- 2) Unsur ketertiban, dimaksudkan agar para wisatawan dapat merasakan suasana yang tertib serta adanya kepastian pelayanan dimanapun ia berada selama mengadakan kunjungan
- 3) Unsur kebersihan, dimaksudkan agar para wisatawan dapat menikmati suatu suasana yang bersih, baik dalam arti hygiene dan sanitasi dimanapun ia berada selama mengadakan kunjungan
- 4) Unsur kesejukan, dimaksudkan agar para wisatawan dapat merasakan suatu suasana yang sejuk dan tenang yang disebabkan oleh pertamanan dan penataan lingkungan yang baik.
- 5) Unsur keindahan dimaksudkan agar para wisatawan dapat menikmati suasana indah, baik dari hasil karya manusia, penataan sarana maupun prasarana, fasilitas pelayanan masyarakat dan keadaan alam
- 6) Unsur keramahan, dimaksudkan agar para wisatawan dapat merasakan keramah-tamahan masyarakat, sehingga memberikan kesan bahwa wisatawan dapat diterima di lingkungan masyarakat tersebut

- 7) Unsur kenangan dimaksudkan agar para wisatawan dapat memperoleh kenangan yang indah dan mendalam dari tempat yang telah dikunjungi serta akomodasi yang bersih, nyaman dengan pelayanan ramah, pertunjukan seni budaya yang tinggi nilainya, menikmati makanan khas daerah yang lezat serta tersedianya cenderamata yang menarik dan mudah dibawa pulang

Sedangkan dalam pengembangannya mengalami keterbatasan karena objek wisata Pantai Ujungnegoro ini masuk di wilayah konservasi pada zona pemanfaatan terbatas, dimana hanya diperuntukkan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan budidaya perairan pantai dan/ atau pendidikan. Kawasan konservasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati No 47 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Batang dengan luas mencapai 6.893,75 Ha dan panjang bentang pantai sejauh 17 km. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang menjelaskan bahwa kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu: (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumber daya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana Maghribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang. (Nnd & Hapsari, 2012, pp. 117–118).

Selain itu, pada pengembangannya harus memerhatikan terkait dengan zonasi Taman Wisata Alam Laut, yang meliputi :

- 1) Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- 2) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam;
- 3) Berdasarkan hal tersebut maka semua pemanfaatan ruang pada daerah Pantai Ujungnegoro-Roban harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

Di samping keindahan serta potensi kepariwisataan, masih terdapat hal-hal yang kurang mendukung program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 yaitu dalam hal kebersihan, keindahan, kesejukan, dan kenangan, serta pengelolaan yang kurang optimal.

Gambar 1. 1 Pembuangan Sampah Sembarangan di Pantai Ujungnegoro



Sumber : Dokumentasi Peneliti (diambil menggunakan kamera *handphone* pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 10.37 di Pantai Ujungnegoro)

Gambar 1. 2 Gua Aswotomo Kurang Terawat



Sumber : Dokumentasi Peneliti (diambil menggunakan kamera *handphone* pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 10.37 di Pantai Ujungnegoro)

Pada gambar di atas menunjukkan kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan pada Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang terutama dalam hal pembuangan sampah. Pengelola sudah mengingatkan tidak membuang sampah sembarangan melalui spanduk yang tertempel di beberapa titik di Pantai Ujungnegoro tetapi masih banyak sampah yang berserakan. Selain itu menunjukkan Gua Aswotomo juga seringkali dijumpai sampah dan berbau tidak enak. Permasalahan diatas kurang mendukung program sapta pesona dalam hal kebersihan yang akan memengaruhi unsur lainnya serta menyebabkan kawasan konservasi menjadi tercemari sampah yang terbawa angin dan ombak lalu mengendap pada karang-karang yang dilindungi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka peneliti menemukan fenomena yang ada diantaranya jumlah pengunjung dan pendapatan yang meningkat, namun dalam pengembangannya masih terbatas karena juga berpedoman pada aturan konservasi dan juga kebersihan dan pengelolaan fasilitas yang belum optimal, masih memerlukan perawatan dan pembaharuan.

Maka dari itu timbullah pertanyaan penelitian, **“bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang?.”**

Adanya permasalahan dalam pengembangan pariwisata tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang”**, karena Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro merupakan memiliki dua kepentingan yaitu di sektor ekonomi dan politik yang meliputi keuntungan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Batang dan sebagai salah satu pertahanan dan perlindungan kawasan tersebut

1.2 Identifikasi Masalah

Dari berbagai permasalahan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

- 1) Belum tercapainya program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 yaitu dalam hal kebersihan, keindahan, kesejukan, dan kenangan, serta pengelolaan yang kurang optimal.
- 2) Adanya keterbatasan dalam pengembangan pariwisata dikarenakan objek wisata tersebut masuk dalam wilayah konservasi zona pemanfaatan terbatas yang hanya diperuntukkan kegiatan pariwisata dan rekreasi,

penelitian dan pengembangan budidaya perairan pantai dan/ atau pendidikan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir Pantai Ujungnegero?
2. Apa sajakah faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan konservasi taman pesisir Pantai Ujungnegero?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai Ujungnegero.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu, menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan hasil penelitian,
2. Bagi pemerintah yaitu, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan obyek wisata yang telah diteliti,

3. Bagi masyarakat, mendapat tambahan pengetahuan tentang pariwisata di kabupaten Batang dan untuk meningkatkan kepedulian terhadap obyek wisata di sekitar masyarakat,
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya terutama dalam sektor perkembangan pariwisata

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah

Tabel 1. 3 Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
Litha Maria Tanod, William A. Areros, Very Y. Londa (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Londa, n.d.)	Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan kajian sumber daya pembangunan khususnya konsep implementasi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, Observasi dan studi dokumentasi.	Temuan Penelitian bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum memiliki kebijakan yang menjadi dasar hukum yang jelas dalam pengembangan pengelolaan objek wisata di Pantai Kombi. Sumberdaya manusia pengelola objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas

	kebijakan.		penunjang dan anggaran untuk pengelolah objek wisata menjadi lebih baik.
Kariaman Sinaga; M. Amri Nasution; Ayu Trisna Dewi (2021), Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Sinaga et al., 2021)	untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin.	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Pengembangan pariwisata belum berjalan secara maksimal dikarenakan tidak menerapkan prinsip-prinsip implementasi. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi upaya prioritas dalam mendukung efektifitas dan efisiensi suatu program kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui penelitian ditemukan bahwa antara pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi dan dapat diduga adanya disposisi yang salah sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi. .
Purnamaningrum, Tri Nugroho (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata pantai Krakal di Kabupaten Gunung kidul	Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Gunung kidul khususnya di Pantai Krakal dan mengetahui apa kendala yang ada dalam implementasi kebijakan.	Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan eksplorasi.	Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan sejumlah faktor penghambat atau kendala yang bisa dipetakan adalah kurangnya komunikasi antar pelaku kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, kecenderungan sikap oleh beberapa masyarakat di

			Pantai Krakal yang masih menunjukkan penolakan, belum adanya SOP (Standart Operating Procedure) yang khusus terkait implementasi kebijakan serta masih adanya penyebaran tanggung jawab antar instansi.
Suwandoko, dkk. (2022). Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup Di Taman Hutan Raya Bunder (Simbolon et al., n.d.)	Untuk menganalisis urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup dan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang difokuskan terhadap pelaksanaan hukum yang ada dalam masyarakat yakni implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder.	Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan bertujuan supaya kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara baik, proporsional, dan dilestarikan oleh generasi masa kini maupun generasi masa depan.
Muhamad Ismail (2020), Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua	merumuskan strategi pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Papua melalui analisis SWOT	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis swot dan wawancara	Pengelolaan potensi sumber wisata alam Papua masih secara tradisional dikelola oleh masyarakat adat. Salah satu kendala pengembangan industri pariwisata Papua adalah ketidakmampuan penyusunan masterplan pariwisata daerah, minimnya promosi wisata alam dan budaya, banyaknya migrasi ke Papua, dan kondisi keamanan yang tidak stabil.

			Padahal, kegiatan pariwisata tahunan hanya merupakan kegiatan rutin dan tidak memiliki dampak ekonomi (dampak ganda). Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan potensi wisata alam untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga iklim pariwisata yang kondusif.
Febriyan, Erwin; Saraswati, Saraswati (2019), Strategi Pengembangan Pariwisata Situ Cisanti Kecamatan Kertasari	Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Pariwisata di Situ Cisanti	analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis, SWOT dan analisis supply-demand.	Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan harus memperhatikan kondisi alam itu sendiri yang harus dijaga. Salah satunya adalah ekowisata. Jenis kegiatan pariwisata ini mengedepankan nilai konservasi dan kealamian tempat yang dijadikan tempat wisata. Ekowisata dapat digunakan untuk mendidik dan memahami pentingnya lingkungan bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.
Zam Zam Masrurun (2020), Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Olahraga Paralayang Di Kabupaten Wonosobo	Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata Olahraga paralayang di Bukit Kekep, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten	Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan SWOT	Hasil dari penelitian ini adalah objek wisata Pantai Jodo memiliki nilai skor potensi tinggi, dan yang lain hanya memiliki nilai skor sedang. Permasalahan utama yang dihadapi Pantai Sigandu adalah kiriman sampah dan abrasi, sedangkan Pantai Ujungnegoro memiliki

	Wonosobo serta merumuskan alternatif strategi pengembangan.		permasalahan terhadap pembangunan proyek PLTU dan lahan yang terbatas untuk pengembangan.
Riza Moufi Afridho, (2019) Analisis Potensi Objek Wisata Alam Di Kabupaten Batang (Afridho & Priyono, 2019)	Untuk menganalisis tingkat potensi objek wisata alam, menganalisis faktor pendorong dan penghambat pengembangan, dan menyusun strategi pengembangan yang tepat.	Metode pada penelitian ini berupa observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan pada masing-masing objek wisata alam, yaitu: Pantai Sigandu, Pantai Ujungnegoro, Pantai Celong, Pantai Jodo, dan Pemandian Sangubanyu kemudian memberi nilai potensi tinggi, sedang, dan rendah	Hasil dari penelitian ini adalah objek wisata Pantai Jodo memiliki nilai skor potensi tinggi, dan yang lain hanya memiliki nilai skor sedang. Permasalahan utama yang dihadapi Pantai Sigandu adalah kiriman sampah dan abrasi, sedangkan Pantai Ujungnegoro memiliki permasalahan terhadap pembangunan proyek PLTU dan lahan yang terbatas untuk pengembangan.
Ida Ayu Diah Laksmi Gayatri (2021), Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali (Gayatri, 2021)	untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen	Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni implementasi telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kendala, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Selain itu juga, terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida

Devid Trinaldo Simatupang, M.Pa (2020), Strategi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Di Kepulauan Riau	untuk menemukan komponen strategis dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yaitu rencana strategis yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada konsep pariwisata dan pengembangan lingkungan. Populasi dalam penelitian ini berupa situasi sosial dengan partisipan yang ada di dalamnya yaitu Pemerintah dan stakeholder pariwisata, turis dan masyarakat. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara	Perkembangan pariwisata dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dilihat dalam peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Efek negatifnya meliputi: polusi udara, polusi air, sampah, perusakan situs sejarah dan masalah penggunaan lahan.
--	--	--	--

Berdasarkan review penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu diatas yaitu berfokus pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, serta metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokus dari penelitian ini merupakan kawasan konservasi sekaligus objek wisata sehingga dalam pengembangannya memiliki perbedaan dengan pengembangan pariwisata lainnya dimana harus mengikuti pedoman tentang

konservasi. Selain itu dari penelitian ini kita mengetahui bahwa pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang memiliki kepentingan di sektor ekonomi dan politik. Pada sektor ekonomi yaitu meliputi keuntungan yang diperoleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Sedangkan pada sektor politik yaitu perlindungan dan pertahanan kawasan konservasi tersebut.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan dibuat untuk mendapatkan sebuah solusi akan permasalahan manusia yang bermacam-macam. Menurut Sombu et al (2010) dalam (Situmorang, 2016), kebijakan adalah seperangkat konsep dan gagasan yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Thomas R. Dye dalam (Abdal, 2015) kebijakan publik merupakan sesuatu keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut (Dunn, 2003) kebijakan publik adalah pola interdependen kompleks dari pilihan kolektif yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Syafiie (2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, karena akan berusaha untuk mengatasi, mengurangi dan mencegah kejahatan, dan sebaliknya, menjadi advokat, inovator dan pemimpin hal-hal baik yang terjadi dalam rangka cara terbaik dan tindakan yang tepat sasaran.

Secara umum, istilah kebijakan sering digunakan untuk melihat satu atau lebih pelaku dalam bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012). Menurut Sombu et al (2010) dalam (Situmorang, 2016), kebijakan adalah seperangkat konsep dan gagasan yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro diatur dalam Peraturan Bupati Batang nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah.

1.5.2.2.Pengembangan Pariwisata

Menurut Barreto dan Giantari (Septiwirawan et al., 2020, p. 5) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Sedangkan menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayati (200:80) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendatang di suatu wilayah, daerah,kota aatau negara tertentu yang berkaitan dengan kedatangan, bertempat tinggal, serta segala aktivitas pendatang tersebut di suatu daerah, wilayah, kota atau negara tertentu.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak.

Menurut Sastrayuda (Meray et al., 2016, p. 4) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

- a) Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
- b) Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
- c) Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
- d) Pendekatan kewilayahan, aspek keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
- e) Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang

disentuh atau digunakan sebagai bagian dari aspek keberhasilan pengembangan.

Pariwisata menurut Yoeti (2008:8) seharusnya bisa memenuhi 4 kriteria yaitu

:

- a) Merupakan aktivitas bepergian yang dilakukan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya
- b) Perjalanan yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang, bukan mencari keuntungan di wilayah, daerah, negara yang menjadi tujuan perjalanan
- c) Kegiatan berbelanja yang dilakukan wisatawan menggunakan uang yang telah dibawa, bukan didapat ketika dalam perjalanan menuju tempat wisata
- d) Perjalanan yang ditempuh minimal dilakukan selama 24 jam atau lebih

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang ini merupakan suatu dilematis karena merupakan sumber pendapatan daerah dan sebagai

kawasan konservasi yang dilindungi, sehingga dalam implementasi pengembangan pariwisata, implementor perlu dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

1.5.2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses dalam tahapan kebijakan publik. Pada umumnya implementasi diterapkan setelah adanya kebijakan, implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk diterima dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil yang diharapkan. (Dr. Dra. Karmanis, M.Si. Karjono. ST., 2020, p. 1)

Implementasi kebijakan menurut Dunn, mengemukakan implementasi kebijakan yaitu adalah : “Pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”. implementasi kebijakan merupakan aktifitas praktis yang mengarah pada pemilihan tindakan dan pengamatan sampai selesainya waktu pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan Publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.(natika, 2020, p. 5)

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. (natika, 2020, p. 5)

Gordon mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuantujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.(natika, 2020, pp. 5–6)

Sedangkan menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2014) implementasi kebijakan publik adalah cara dan langkah aktor-aktor atau lebih utamanya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk sebaik mungkin sesuai dengan ketepatan bagaimana kebijakannya, ketepatan siapa

pelaksana kebijakannya, ketepatan targetnya, ketepatan lingkungannya, serta ketepatan proses kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

- 1) Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- 2) Tepat yang kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).
- 3) Tepat ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, atukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Tepat keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara

lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

5) Tepat kelima adalah “tepat proses”. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu:

a) Penerimaan Kebijakan. disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

b) Adopsi Kebijakan, dimana setelah memahami kebijakan, pelaksana melaksanakan sebuah tugas berdasarkan kebijakan tersebut.

c) Kesiapan Strategis. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dalam teori implementasi kebijakan publik terdapat berbagai model implementasi kebijakan publik di antaranya:

1) Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu (Politik et al., 2017, p. 35):

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan ukuran dalam keberhasilan suatu kebijakan yang memiliki hubungan erat dengan sikap para pelaksana, serta tujuan yang telah ditetapkan oleh pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Mulyadi, 2015) mengidentifikasi fenomena kinerja merupakan tahap yang penting dalam analisis implementasi kebijakan. Fenomena tersebut digunakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Ukuran atau standar keberhasilan suatu kebijakan mencakup fenomena keberhasilan yang meliputi tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak dan dalam pelaksanaannya disertai pedoman yang mengatur tentang kebijakan tersebut untuk mengukur kualitas kebijakan serta menghasilkan arah perubahan menjadi lebih baik.

b) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi yaitu meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, koordinasi antar organisasi dan proses interaksi antar organisasi.

d) Sikap para pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik yang meliputi pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan intensitas terhadap kebijakan. Kemudian melihat bagaimana pelaksana menerapkannya apakah sudah baik atau belum.

e) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yaitu penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi yang akurat. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang

terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Pada komunikasi antar organisasi dapat dilihat dari hubungan antar organisasi pelaksana yang meliputi proses interaksi, media yang digunakan dalam berinteraksi, hambatan dalam koordinasi dan bagaimana organisasi pelaksana mengendalikannya.

f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan aspek eksternal dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek ini dapat mendukung maupun menghambat berjalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus saling kondusif

- 2) Model implementasi menurut Edwards III (Tajhan, 2010) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Menurut Edwards komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan: *“Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent”*. Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/decision maker berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/discretion pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang

spesifik. Mengenai sumber daya, Edwards III menjelaskan bahwa jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards, sebagaimana disebutkan di atas meliputi staff, informasi, otoritas, dan fasilitas. Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Fenomena keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. (Dr. Dra. Karmanis, M.Si. Karjono. ST., 2020, pp. 3–4)

- 3) Model implementasi menurut Merilee S. Grindle (Trisnanti, 2016, pp. 3–5) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih

dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

- 4) Model dari Mazmanian dan Sabatier membagi variabel yang berpengaruh pada kesuksesan kebijakan, diantaranya sifat khas dari suatu permasalahan, sifat khas kebijakan itu sendiri dan variabel lingkungan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier juga menggolongkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang memiliki tiga variabel (Politik et al., 2017, p. 37)

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebagaimana tersebut dalam latar belakang yaitu pengembangan pariwisata tersebut belum dilakukan secara maksimal masih ada beberapa masalah seperti belum tercapainya program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 yaitu dalam hal

kebersihan, keindahan, kesejukan, dan kenangan, serta pengelolaan yang kurang optimal dan adanya keterbatasan dalam pengembangan pariwisata dikarenakan objek wisata tersebut masuk dalam wilayah konservasi

Peneliti akan melihat seberapa jauh keberhasilan implementasi tersebut berdasarkan 5 ketepatan dari Riant Nugroho dan mengidentifikasi faktor-faktor dalam implemetasi tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

1.5.2.4. Kerangka Berpikir

- Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Batang
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2031

MASALAH

- Belum tercapainya program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : Km.5/Um.209/Mppt-89 yaitu dalam hal kebersihan, keindahan, kesejukan, dan kenangan, serta pengelolaan yang kurang optimal. Kurangnya kebersihan pantai dan kesadaran para pengunjung untuk menjaga lingkungan terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan
- Adanya keterbatasan dalam pengembangan pariwisata dikarenakan objek wisata tersebut masuk dalam wilayah konservasi

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang?
- Apa sajakah faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang?

Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata menurut Riant Nugroho (tahun) :

- 1) Ketepatan kebijakan
- 2) Ketepatan pelaksanaan
- 3) Ketepatan target
- 4) Ketepatan lingkungan
- 5) Komunikasi antar organisasi
- 6) Ketepatan proses

Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang menurut Van Meter & Van Horn (tahun)

- 1) Sumber Daya
- 2) Komunikasi antar organisasi
- 3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

1.7. Definisi Konsep

1.7.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu urusan yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di sekitar masyarakat serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

1.7.2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam tahapan kebijakan publik. Pada umumnya implementasi diterapkan setelah adanya kebijakan, implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk diterima dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil yang diharapkan.

1.7.3. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses atau langkah secara bertahap dengan tujuan untuk menciptakan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

1.7.4. Konsep Konservasi Taman Pesisir

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

1.8. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian- bagian supaya mudah dipahami dan dapat diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya yaitu penjabaran konsep ke dalam bagian-bagian/ dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur. Dalam sebuah konsep terdiri dari beberapa aspek (Barkah, 2017, p. 63). Peneliti menggunakan lima ketepatan dalam implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho.

1.8.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

Adapun pada lima ketepatan Riant Nugroho (Nugroho, 2014) yang bertujuan untuk mengukur bagaimana ketepatan implementasi kebijakan itu sendiri antara lain yakni sebagai berikut :

1) Ketepatan Kebijakan

- a) Ketepatan Pedoman kebijakan yang mengatur tentang kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;

2) Ketepatan pelaksanaan

- a) Pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;
- b) Peran pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;

3) Ketepatan Target

- a) Tujuan dan sasaran kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;
- b) Manfaat yang diperoleh dari adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

4) Ketepatan Lingkungan

- a) Hubungan atau interaksi antar pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;

5) Ketepatan Proses

- a) Pemahaman pelaksana terkait kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;
- b) Respon pelaksana terhadap kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;
- c) Penerapan oleh pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

Berhasil tidaknya implemementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pengimplementasi kebijakan ini. Peneliti menyimpulkan model implementasi kebijakan yang peneliti anggap lebih relevan dengan penelitian ini

dalam kajian teori yaitu Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Van Meter & Van Horn yaitu :

a) Sumber Daya dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

- a) Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;
- b) Sumber keuangan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang;

b) Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

- a. Media yang digunakan dalam berinteraksi
- b. Hambatan dalam koordinasi
- c. Pengendalian

c) Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

- a. Dukungan dari masyarakat adanya pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

b. Lingkungan ekonomi yang menunjang keberlangsungan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

c. Dukungan dari pemerintah adanya pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018b, p. 27) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mendasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Darmadi dalam (Dewi, 2019), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri - ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian ini meliputi tipe pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis dan interpretasi data serta kualitas data

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Djarm'an Satori penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin dapat mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dilakukan secara kuantitatif yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya. (Djam'an Satori, 2018, p. 42)

Menurut Moleong (Moleong, 2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada

Selain itu, Sugiono (Sugiyono, 2018) mengusulkan untuk menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat pasca positivis untuk mengkaji kondisi benda-benda alam, dimana peneliti adalah alat kuncinya, melalui triangulasi, induksi atau analisis data kualitatif. Untuk mengumpulkan data, hasil penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi.

Menurut penelitian Nana Syaodih Sukmadinata dalam (Djam'an Satori, 2018, p. 42) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan fenomena fenomena alam dan rekayasa buatan yang ada dengan lebih memperhatikan keterkaitan antara karakteristik, kualitas dan aktivitas. Satu

satunya metode yang diberikan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan pencatatan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh data yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai Ujungnegoro di Batang diantaranya yaitu melihat implementasi dari sikap birokrasi pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut, disamping itu ingin melihat gambaran secara nyata yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam berpariwisata, pengetahuan masyarakat tentang wilayah konservatif, serta perilaku para pelaku usaha di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Situs penelitian ini dilaksanakan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro di Kabupaten Batang yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pengembangan pariwisata yang lain, serta masyarakat sekitar yang memiliki andil untuk ikut mengembangkan pariwisata tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang, yang

merupakan informan utama. Sementara itu, untuk informan pendukung yaitu pengelola, pokdarwis, pokmaswas, pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar

1.9.4 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif yang akan diperoleh meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata Pantai Ujungnegoro, peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro, sumber dana yang digunakan dalam pengembangan, gambaran objek wisata, dan hasil wawancara.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang serta Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Batang. Data yang akan diperoleh meliputi data hasil wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti memperoleh data tersebut dari data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data ini diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan- aturan yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Data yang akan diperoleh meliputi data dari dokumen “Kabupaten Batang Dalam Angka 2021”.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan menggunakan data, peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan pada obyek penelitian yang akan diteliti sebagai sumber data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang berguna untuk mengungkap data mengenai implementasi kebijakan

pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai Ujungnegoro di Kabupaten Batang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh data atau keterangan yang bertujuan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara tanya secara langsung dengan responden yang menggunakan panduan untuk wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang serta Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Batang

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian tersebut yang kemudian ditelaah secara terus menerus sehingga dapat mendukung dan menambah dalam pembuktian suatu masalah atau kejadian dalam penelitian tersebut.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan meringkas data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, serta studi kepustakaan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, mendeskripsikan unit yang ada, mensintesis, dan menyusunnya. Analisis data dalam studi kualitatif dilakukan sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Spradley dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan beberapa teknik analisis data yaitu

1) Analisis Domain

Merupakan teknik untuk memperoleh gambaran umum dalam menjawab fokus penelitian yang dilakukan dengan membaca naskah menyeluruh untuk memperoleh domain yang telah ditetapkan. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *monitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun

sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2) Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi yaitu peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi. Teknik ini dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan semikian domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) dan outline.

3) Analisis Komponensial

Adalah teknik yang dilakukan dengan mengelompokkan atau mengkategorikan fenomena-fenomena yang telah ditemukan untuk dianalisis sesuai dengan tujuan dan sarannya. Analisis dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*Contras question*). Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam

domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik yang berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

4) Analisis Tema Curtural

Analisis ini mengumpulkan banyak tema, fokus budaya, nilai dan simbol budaya yang ada pada setiap domain kemudian dicari hubungan setiap domainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data domain. Dalam penelitian ini, akan meneliti bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang yang melihat keberhasilan implementasi tersebut melalui fenomena yang ditemukan.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kualitas data, peneliti biasanya menggunakan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan atau validitas suatu data. Teknik triangulasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan hal-hal selain data untuk pemeriksaan data atau perbandingan dengan data. Triangulasi Waktu Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil dengan cara mengecek data observasi, dokumentasi

maupun cara yang lain di waktu yang berbeda. Menurut (Sugiyono, 2016) terdapat 3 teknik triangulasi yang meliputi sebagai berikut :

a. Triangulasi Sumber

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinal, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah ada dengan beberapa sumber yang diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinal dengan cara mengecek data yang telah ada dengan cara yang berbeda. Misalnya jika data diperoleh dengan cara dokumentasi, maka pengecekan data bisa melalui wawancara, observasi dan cara yang lainnya.

c. Triangulasi Waktu

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinal dengan cara mengecek data observasi, dokumentasi maupun cara yang lain di waktu yang berbeda.